

Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan *Stunting* Di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Dandan Haryono¹, Lena Marlina²

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tasikmalaya

¹dandanharyono@gmail.com, ²lenamarlina@gmail.com

Dikirim: 12 Oktober 2021 Direvisi: 16 November 2021 Diterima: 18 Desember 2021

Abstrak

Berdasarkan observasi di Desa Singaparna ditemukan permasalahan mengenai partisipasi pada pencegahan *stunting*, yaitu masyarakat kurang berpartisipasi dalam tahap *assesment* karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat mengenai *stunting*. Masyarakat tidak peduli dalam masalah pencegahan *stunting* dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan *stunting*, seperti menjaga lingkungan dengan cara melaksanakan gerakan kebersihan di lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan, reduksi data, *display data*, *drawing conclusion*. Validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dari empat tahap yang dilaksanakan dua tahap partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik yaitu tahap alternatif program dan tahap evaluasi, sedangkan tahap *assesment* dan tahap pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum optimal karena tahap *assesment* dan tahap pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, *Stunting*

Abstract

Based on observations in Singaparna Village, problems were found regarding participation in *stunting* prevention. Namely the community did not participate in the assessment stage because of the lack of knowledge and information received by the community about *stunting*. the community does not care about the problem of *stunting* prevention and does not participate in the implementation of *stunting* prevention. such as protecting the environment by carrying out environmental hygiene movements. The purpose of this study was to determine community participation in *stunting* prevention in Singaparna Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are library research, interviews, observation and documentation studies. Data analysis techniques are data reduction, data display, and conclusion

drawing. Data validation using source triangulation. Based on research that community participation in stunting prevention in Singaparna Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency, of the four stages carried out, two stages of participation have been carried out well. Conclusion Community participation in stunting prevention in Singaparna Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency has not been optimal because the assessment stage and program implementation stage have not been carried out properly.

Kata kunci: *Community Participation, Stunting*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan nasional jadi salah satu cita-cita luhur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 yaitu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Keadilan Sosial untuk mewujudkannya, dirancang sebuah program pembangunan nasional yang komprehensif dan *sustainable*, salah satunya pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat yang sehat, menjadi fondasi kekuatan sebuah negara, Dalam pembangunan kesehatan nasional ini, pemerintah berupaya mendorong dan mengedukasi masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang paham seutuhnya akan kesehatan diri dan lingkungannya. Paradigma hidup sehat ini penting dimiliki untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Misi Indonesia Sehat ini bisa diwujudkan dengan upaya dan kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, adapun pembangunan kesehatan suatu sistem yang mengatur perilaku sosial dan individu dalam bidang Kesehatan pembangunan ini melibatkan pemerintah dan *stakeholder*, dalam mengimplementasikan kondisi kesehatan yang maksimal perlu optimalisasi pada sistem Kesehatan. Hal ini merupakan sinergi pendekatan vertikal dan horizontal dalam menggapai suatu tujuan bersama. Upaya ini mutlak diwujudkan karena kesehatan adalah hak azasi manusia sesuai tujuan luhur negara kesatuan republik Indonesia yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan secara komprehensif dilakukan sesuai keadaan lokal secara umum dan spesifik sesuai pendekatan sosial budaya. Tata kelolanya pun perlu melibatkan seluruh komponen atau *stakeholder* kesehatan.

Selain itu diperlukan pemberian pelayanan kesehatan optimal dan menyeluruh dengan memperhatikan kondisi sosial diantaranya kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Pembangunan kesehatan nasional ini diwujudkan mulai dari bawah, artinya kesehatan masyarakat ini dimulai dari daerah-daerah. Terlebih Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, di mana pemerintah lokal di daerah berkewajiban pada pelaksanaan pelayanan Kesehatan di tingkat lokal daerah. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai “payung hukum”. Daerah bisa membuat peraturan secara khusus dan lebih spesifik dalam memperjelas fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah tapi tetap selaras terhadap aturan di atasnya. Maka, aturan mengenai sistem kesehatan di tingkat lokal menjadi sangat penting seperti yang dipaparkan di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional lampiran nomor 465 bahwa perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan besar di daerah harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pada

masa berlakunya desentralisasi ini, posisi sistem Kesehatan bergerak menuju tingkat lokal daerah kota atau kabupaten. maka akan sangat riskan jika pemerintah tidak punya kapabilitas dalam merespon permasalahan yang mencuat di masyarakat. Optimalisasi terhadap kesehatan di tingkat daerah otonomi baik itu kota, kabupaten, maupun tingkat provinsi jadi solusi yang tepat dalam menyediakan layanan Kesehatan dasar bagi masyarakat baik itu secara individu, keluarga, maupun komunitas masyarakat adat dan sebagainya.

Selain itu adanya *support* kebijakan dan anggaran dapat memperkuat ekosistem Kesehatan di wilayah berkembang dalam mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi. Penguatan sistem kesehatan dilakukan untuk meningkatkan hasil Kesehatan yang maksimal melalui serangkaian upaya. Pada hal ini dukungan kebijakan politik adalah merupakan hal penting yang mewadahi optimalisasi sistem tersebut. Hal ini didasari dalam usaha penguatan Kesehatan yang menyeluruh, peningkatan peran masyarakat dan sinergi advokasi untuk mencapai tujuan sebuah program yang nyata dan berkualitas. Misi Pembangunan Kesehatan di Indonesia terutama ditujukan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu Pembangunan Kesehatan ini sebagai upaya perbaikan kesehatan rakyat melalui pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan lainnya. Semua itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pembangunan aspek kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu pemerintah daerah yang saat ini sedang menghadapi permasalahan bidang kesehatan, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* adalah keadaan dimana anak gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi parah yang mengakibatkan anak kerdil tidak sesuai dengan umurnya. Walaupun kebijakan penanggulangan *stunting* telah diterbitkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* tetapi kejadian *stunting* di Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat. Angka *stunting* di Kabupaten Tasikmalaya hingga September 2020 jumlahnya mencapai 33,8% atau melebihi target nasional untuk *stunting* tidak melebihi 20%. Kecamatan Singaparna merupakan wilayah kecamatan yang memiliki angka *stunting* cukup tinggi diantara, 136 balita dengan status gizi rendah dan 444 balita dengan status pendek. Desa Singaparna merupakan penyumbang jumlah *stunting* paling tinggi dengan 127 balita dengan status gizi sangat pendek dan 113 balita dengan status gizi pendek (Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2020). Salah satu upaya pencegahan meningkatnya angka *Stunting* di Desa Singaparna diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 200). Berdasarkan telaah teori tersebut partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting* sangat diperlukan, karena masyarakat akan ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah *stunting*, menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membantu dalam pencegahan *stunting*, memberikan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah *stunting*, turut serta dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah *stunting* dan masyarakat terlibat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam pencegahan *stunting*. Tingginya tingkat/angka kejadian *stunting* pada balita masih di Desa Singaparna dapat menghambat upaya peningkatan

kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Data kejadian *Stunting* di Desa Singaparna tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Data *Stunting* di Desa Singaparna

No	Kedusunan	RW	Jumlah
1	Kedusunan 1	RW. 03	9
		RW. 17	7
2	Kedusunan 2	RW. 06	10
		RW. 08	9
3	Kedusunan 3	RW. 11	9
		RW. 12	8
4	Kedusunan 4	RW. 15	8
		RW. 16	7
Jumlah			67

Sumber : Desa Singaparna, 2020

Membahas mengenai partisipasi maka terdapat penelitian terdahulu yang relevan, Berkaitan dengan penelitian dahulu yang di kutip oleh penulis ialah penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang dijadikan sebagai gambaran untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan sebagai kebaruan dalam penelitian penulis, kemudian untuk menemukan kebaruan sebagai *novelty* pada penelitian ini untuk menggali permasalahan partisipasi dan *stunting* berikut penulis sajikan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis terdahulu.

Tabel 2
Penelitian terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Teori yang digunakan	Alat Analisis	Hasil
1	Nurbudiwati (2019)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Garut	Partisipasi (Zamroni, 2011)	Deskriptif kualitatif	Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Garut belum meningkat

2	Nuring Septyasa Laksana (2013)	Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul	Partisipasi (Huraerah, 2008)	Deskriptif Kualitatif	Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Siaga belum dilaksanakan secara optimal di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul
---	---	--	------------------------------------	--------------------------	---

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka bisa disimpulkan bahwa persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah judul yang relevan yakni tentang kontribusi masyarakat dalam hal kesehatan lingkungan. Dalam hal ini kesehatan lingkungan menjadi faktor penyebab dari *stunting*. Selain itu ketiga penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dalam hal teori untuk menganalisis partisipasi masyarakat.

Perbedaan lainnya adalah objek penelitian, jika di penelitian sebelumnya cakupan analisisnya wilayah kabupaten dan kecamatan, sedangkan objek penelitian penulis fokus di wilayah desa sehingga lebih spesifik. Perbedaan lainnya ada di analisis teori yang dipergunakan, objek penelitian dan kebaharuan penelitian.

Membahas mengenai partisipasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2021), arti kata partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Arti lainnya dari partisipasi adalah keikutsertaan. Secara umum partisipasi masyarakat adalah perwujudan kesadaran, kepedulian serta tanggung jawab masyarakat dalam menggali sumber daya dan potensi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Beberapa ahli juga mengemukakan arti dari partisipasi ini. Diantaranya menurut (Isbandi, 2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (41) menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Maka, partisipasi masyarakat ini dianggap penting, terlebih partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah sehingga daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakatnya, Partisipasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk hak-hak, di antaranya hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil. Tahap dan unsur partisipasi masyarakat jadi hal yang *urgent* dalam pengembangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu Tahap *Assesment*, Tahap Alternative program atau kegiatan, Tahap Pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan dan Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil) (Isbandi, 2007). Penjelasannya yaitu:

1. Tahap *Assesment*

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam melihat permasalahan. Dengan begitu mereka jadi punya paradigma tersendiri.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan. Tahapan ini melibatkan masyarakat untuk berpikir mengenai problematika yang mereka hadapi berikut cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Tahapan ini masyarakat melaksanakan atau implementasi program yang sudah dirancang agar terlaksanakan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Pada tahapan ini dilakukan pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang berjalan.

Dari uraian definisi dari berbagai sumber, maka makna partisipasi masyarakat menurut penulis yaitu keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi hingga proses evaluasi program. Masyarakat memberikan sumbangan ide terhadap pencegahan *stunting*. Sekaligus masyarakat juga sebagai subjek dan objek pencegahan *stunting* yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri. Melalui partisipasi aktif masyarakat ini upaya pencegahan *stunting* diharapkan bisa terwujud dengan baik.

Berdasarkan observasi sesuai latar belakang diatas, di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ditemukan permasalahan diantaranya:

1. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam tahap *assesment* karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat mengenai *stunting* sehingga masyarakat tidak peduli dalam masalah pencegahan *stunting*.
2. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program *stunting* seperti menjaga lingkungan dengan cara melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan.

Selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimanakah partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif ialah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi (Arifin, 2012). Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari empat hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 2000). Lokasi

penelitian adalah Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Singaparna Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Waktu penelitian penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, penulis menganalisis berdasarkan tahap-tahap partisipasi yaitu tahap *assesment*/penilaian, tahap alternatif program kegiatan, tahap pelaksanaan program kegiatan dan tahap evaluasi (Isbandi, 2007), yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap *Assessment*

Tahap *assesment* pada penelitian partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna diukur berdasarkan parameter pengetahuan masyarakat tentang *stunting*, informasi tentang pencegahan *stunting* dan sosialisasi tentang pencegahan *stunting*.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa penyebab *stunting* khususnya di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah penyebab langsung dan penyebab tidak langsung sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Penyebab *Stunting* di Desa Singaparna
Sumber: Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel tersebut penyebab *stunting* di Desa Singaparna dikarenakan berbagai faktor. Secara langsung penyebabnya karena Asupan Gizi dan Status Kesehatan. Adapun penyebab tidak langsung yakni karena faktor Ketahanan Pangan terdiri dari ketersediaan dan

akses pangan bergizi; lalu faktor Lingkungan Sosial terdiri dari norma, makanan bayi dan anak, pendidikan, tempat kerja; faktor Lingkungan Kesehatan terdiri dari akses pelayanan preventif dan kuratif; faktor lainnya yakni Lingkungan Pemukiman terdiri dari air, sanitisasi dan kondisi bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pertama bahwa masyarakat Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya kurang mengetahui tentang penyakit *stunting* dan dampak negatif yang akan timbul dari *stunting*. Hal ini merupakan salah satu penyebab bertambahnya kejadian *stunting* di Desa Singaparna karena dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tidak akan bisa mencegah kejadian *stunting*. Kedua, dari tahap *assesment* adalah informasi tentang pencegahan *stunting*. dapat disimpulkan bahwa informasi tentang *stunting* di masyarakat Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya masih kurang, sehingga sebagian masyarakat kurang peduli terhadap hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa informasi tentang *stunting* dapat diberikan oleh semua pihak apabila pihak-pihak tersebut peduli, tentang edukasi mengenai pencegahan *stunting* sudah sering disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan baik melalui media cetak maupun media elektronik, antara lain:

- a) Penuhi asupan nutrisi yang cukup di 1.000 hari pertama kehidupan anak yakni sejak masih menjadi janin hingga usia sekitar 2 tahun
- b) Ibu hamil harus rutin melakukan pemeriksaan kandungan
- c) Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- d) Wanita hamil mesti menghindari rokok

Dari hasil penelitian melalui wawancara mengenai informasi pencegahan *stunting* di Desa Singaparna dapat disimpulkan belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan kejadian *stunting* di Desa Singaparna dapat bertambah, karena masyarakat kurang peduli dengan *stunting* tersebut.

Ketiga dari tahap *assessment* adalah sosialisasi tentang pencegahan *stunting*. Mengenai sosialisasi pencegahan *stunting* hasil wawancara tersebut dapat ditemukan bahwa sosialisasi tentang pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum pernah dilaksanakan, hal tersebut berdampak masyarakat kurang peduli terhadap *stunting*, sehingga kurang adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah *stunting*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap *assessment* belum dilaksanakan dengan baik di Desa Singaparna, hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang *stunting* masih kurang, dimana masyarakat tidak mengetahui tentang arti *stunting*, gejala *stunting*, dampak *stunting* dan pencegahan *stunting*. Selain itu kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang kejadian *stunting* dikarenakan belum adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Desa maupun Dinas Kesehatan atau petugas kesehatan lainnya.

Tahap *assesment* merupakan tahap yang penting untuk dapat mencegah *stunting* di Desa Singaparna, karena dengan tahap ini masyarakat dapat mengetahui tentang *stunting*, dengan tidak adanya kegiatan *assessment* maka kejadian *stunting* di Desa Singaparna bisa bertambah.

2. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Dalam tahap ini partisipasi yang diharapkan dari masyarakat di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat dituntut untuk berpikir dalam menjalankan program kemasyarakatan yang dapat membantu dalam pencegahan

stunting. Oleh karena itu dalam tahap ini parameter yang dianalisis adalah pembentukan tim siaga *Stunting* dan pembentukan kelompok kerja kebersihan lingkungan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara dapat disimpulkan bahwa sudah ada tim yang khusus yang menangani kejadian *stunting* di Desa Singaparna. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang menunjukkan sudah terbentuknya Pengurus Siaga Desa Singaparna, berdasarkan hal tersebut kejadian *stunting* di Desa Singaparna seharusnya dapat diminimalisir, karena terdapatnya koordinator yang dapat melaksanakan pendataan dan pelaporan *stunting* dengan cepat kepada dinas terkait. Selanjutnya parameter kedua dari tahap alternatif program adalah pembentukan kelompok kerja kebersihan lingkungan. Dengan adanya pembentukan kelompok kerja kebersihan lingkungan diharapkan dapat melaksanakan kebersihan lingkungan yang dapat mencegah berbagai macam penyakit termasuk *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelompok Kerja masyarakat dalam bidang kebersihan lingkungan sudah ada di tiap-tiap lingkungan RT dan rutin dilaksanakan di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian Alternatif Program atau kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya Tim Desa Siaga yang sudah terbentuk dan adanya kegiatan kelompok kerja bidang kebersihan di tiap-tiap RT yang sudah melaksanakan tugasnya secara rutin.

Alternatif program atau kegiatan dalam pencegahan *stunting* merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program yang dilaksanakan dengan tertib dan teratur dapat meminimalisir kejadian *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

3. Tahap Pelaksanaan Program

Dalam dimensi tahap pelaksanaan program penulis menggunakan parameter pendataan gejala *stunting*, pelaporan gejala *stunting* dan gerakan kebersihan masyarakat di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. dengan adanya pendataan gejala *stunting*, pelaporan gejala *stunting* dan gerakan kebersihan masyarakat akan dapat dievaluasi kejadian *stunting* yang terjadi di Desa Singaparna dapat diketahui bahwa sudah ada penanganan dan pelaporan gejala *stunting* yang dilakukan oleh petugas Posyandu dan Bidan Desa di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dimensi tahap pelaksanaan kegiatan belum optimal dilaksanakan, walaupun sudah ada pendataan dan pelaporan gejala *stunting* tapi tidak didukung oleh gerakan kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Singaparna.

Gerakan kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit, salah satunya adalah *stunting*, dengan adanya gerakan kebersihan lingkungan bukan hanya dilaksanakan di lingkungan luar rumah tetapi termasuk di dalam rumah, hal ini karena beberapa kasus diare bukan hanya bakteri yang berasal dari luar lingkungan tetapi dalam lingkungan keluarga juga yang kurang menjaga kebersihan.

4. Tahap Evaluasi

Penurunan *stunting* oleh pemerintah dijadikan prioritas nasional. Program ini dilaksanakan lintas sektoral di berbagai tingkatan mulai dari tingkat atas hingga tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Maka, pemerintah desa mesti mengerahkan kemampuannya dalam pengentasan *stunting* dengan

membuat kegiatan yang berdampak pada penurunan kasus *stunting*. Kegiatan dirancang di skala desa sehingga lebih menyentuh *grass root* atau akar rumput masyarakat bawah. Program ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada misal dana desa.

Dalam dimensi tahap evaluasi penulis menggunakan parameter pengawasan dan monitoring dari pemerintahan desa dan bidan desa di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Desa Singaparna telah dapat melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kejadian *stunting*, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan dan penurunan angka *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa Singaparna selalu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya parameter kedua yang dibahas dalam tahap evaluasi adalah pengawasan dan monitoring dari bidan desa, dari beberapa wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sudah ada upaya pengawasan dan monitoring baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Singaparna maupun Bidan Desa dalam pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, tetapi hal tersebut belum dapat berperan aktif terhadap penurunan dan pencegahan *stunting*. Setelah dilakukan observasi mengenai intervensi pencegahan *stunting* di tingkat desa, maka upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara berikut:

Pemerintah desa membuat perencanaan program dan kegiatan, lalu melakukan *budgeting* untuk mengimplementasikan kegiatan pencegahan *stunting*. Pemerintah desa juga harus memastikan layanan yang tepat sasaran, artinya, sasaran prioritas betul-betul menerima manfaat paket layanan yang diberikan pemerintah yaitu gizi utama, penerapan kegiatan bersinergi bersama kader dalam upaya pembangunan manusia dengan pendamping Program keluarga harapan, petugas Puskesmas, Bidan Desa dan petugas KB, maupun pendamping KB di lapangan. Setelah kegiatan terlaksana, pemerintahan desa harus memaksimalkan monitoring, evaluasi kegiatan, serta memperbaiki layanan kepada sasaran masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dimensi tahap evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya pengawasan dan evaluasi pencegahan *stunting*, apakah yang dilaksanakan oleh pemerintahan di desa ataupun oleh pihak Kesehatan melalui bidan desa.

Evaluasi merupakan pengukuran dan penilaian kinerja terhadap program pencegahan *stunting* yang sedang dijalankan dan relevansinya dengan tujuan yang sudah dicanangkan, bila hasil evaluasi ini menunjukkan dampak positif terhadap sasaran dan tujuan, maka program pencegahan *stunting* telah mencapai tingkat kinerja. Sehingga permasalahan *stunting* di masyarakat bisa teratasi. Evaluasi menjadi tahapan akhir dalam upaya pencegahan *stunting*. Program ini perlu dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya. Dari pantauan dan evaluasi ini jadi dasar keputusan untuk pelaksanaan program pencegahan *stunting* tahap berikutnya, mengenai pembahasan tersebut maka disimpulkan yaitu partisipasi kelompok masyarakat pada pencegahan *stunting* Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum optimal kurang berdasarkan tahap-tahap partisipasi masyarakat. Dari empat tahap yang dilaksanakan dua tahap partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik yaitu tahap alternatif program dan tahap evaluasi, sedangkan tahap *assesment* dan tahap pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Setelah melalui penelitian dan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada pencegahan *stunting* di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Dari empat tahap yang dilaksanakan, dua tahap partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik yaitu tahap alternatif program dan tahap evaluasi, sedangkan tahap *assesment* dan tahap pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pihaknya bisa memberi usulan mengenai kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan *stunting* di tingkat desa. Tujuannya agar masyarakat desa melek terhadap permasalahan *stunting* dan melakukan upaya preventif pencegahan *stunting*.
- b. Bidan Desa dan Kader Posyandu agar dapat lebih intensif dalam pencegahan *stunting* dengan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat baik dalam kegiatan rutin maupun kegiatan yang dilaksanakan secara khusus untuk pencegahan *stunting*.
- c. Tim Siaga Desa yang telah terbentuk, RT dan RW untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan gerakan kebersihan lingkungan dalam pencegahan *stunting*.

REFERENSI

- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Miles, Matthew B dan Huberman, Michael A. (2000). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: University Indonesia - PRESS
- Moleong, J. Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka
- KBBI (2021) Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementrian Pendidikan dan kebudayaan; (Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 22 Februari 2021]